

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA MELALUI BANTUAN
AKSES KONSULER BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963
TENTANG HUBUNGAN KONSULER
(STUDI KASUS JADHAV)

Oleh

Resma Dwi Heldiyanti

Akses konsuler merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada warga negara yang diselenggarakan oleh negara-negara, yang diatur dalam Pasal 36 (1) Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Ketentuan akses konsuler ini selaras dengan hak asasi manusia, yaitu hak perlindungan secara hukum dimanapun mereka berada. Kasus Jadhav yang terjadi pada tahun 2016 antara India dan Pakistan setelah adanya warga negara India yang ditangkap, ditahan, dan diadili di Pakistan, tanpa diberitahu haknya mengenai bantuan akses konsuler. Selain itu, Pakistan juga menolak semua permintaan akses konsuler yang diajukan oleh India dengan alasan ketidak berhakkan Jadhav atas akses konsuler dikarenakan dia diduga telah melakukan kejahatan spionase sampai adanya putusan hukuman mati dari Pengadilan Militer terhadap Jadhav. Hal itulah yang kemudian membuat India melaporkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional, dengan dugaan pelanggaran ketentuan akses konsuler yang dilakukan oleh Pakistan, yang tidak sesuai dengan Konvensi Wina 1963 dan Perjanjian Bilateral Akses Konsuler antara India dan Pakistan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu konvensi-konvensi dan perjanjian bilateral, bahan hukum sekunder yaitu jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, perlindungan hukum bagi warga negara melalui bantuan akses konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 terdapat dalam tiga bentuk, yaitu hak kebebasan berkomunikasi, pemberitahuan konsuler mengenai penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan warga negara kepada negara asal tanpa adanya penundaan, dan hak kebebasan berkunjung serta memberikan bantuan hukum kepada warga negara, namun demikian, di dalam konvensi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai frasa tanpa adanya penundaan. *Kedua*, penyelesaian sengketa mengenai bantuan akses konsuler dalam kasus Jadhav diputuskan oleh Mahkamah bahwa Pakistan telah melanggar Konvensi Wina 1963

karena tidak memberikan pemberitahuan konsuler mengenai penangkapan dan penahanan Jadhav tanpa adanya penundaan, dan karena tidak memberikan akses konsuler kepada Jadhav dan India. Mahkamah mengakui adanya Perjanjian Bilateral Tentang Akses Konsuler antara India dan Pakistan, namun, pada putusannya Mahkamah memberatkan pelanggaran Pakistan terhadap Konvensi bukan terhadap perjanjian bilateral. Mahkamah memutuskan bahwa tidak ada pengecualian terhadap pemberian akses konsuler kepada warga negara yang membutuhkan, termasuk warga negara yang ditangkap, ditahan atau diadili karena dugaan tindak kejahatan spionase. Mahkamah juga memberikan *remedies* kepada India dengan membatalkan putusan hukuman mati untuk Jadhav dan memerintahkan Pakistan untuk mengadili Jadhav atas tindak kejahatan spionase yang diduga terhadapnya, dan memberikan akses konsuler kepada Jadhav selama persidangan dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini, timbullah urgensi untuk perlunya pengaturan yang pasti mengenai waktu yang tepat untuk pemberian bantuan akses konsuler kepada warga negara yang membutuhkan, tanpa terkecuali, dan/atau membuat perjanjian bilateral untuk mendapatkan interpretasi mengenai waktu yang tepat untuk pemberian akses konsuler, yang mudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Akses Konsuler, Perlindungan Hukum Warga Negara, Kasus Jadhav

ABSTRACT

**THE LEGAL PROTECTION FOR NATIONALS THROUGH ASSISTANCE
OF CONSULAR ACCESS BASED ON THE VIENNA CONVENTION ON
CONSULAR RELATIONS 1963
(STUDY OF JADHAV CASE)**

By

Resma Dwi Heldiyanti

Consular access is one of legal protection towards nationals which conducted by nations and regulated under international law on Article 36 (1) of Vienna Convention on Consular Relation 1963 (VCCR). The consular access is in line with the human rights regarding the right of protection, wherever nationals are. Jadhav case is a dispute occurred in 2016 between India and Pakistan, after Indian national arrested, detained, and tried in Pakistan, without informed his rights to consular access. This case was then settled in the International Court of Justice, after India's consular access request was denied by Pakistan several times which deemed inconsistent with the VCCR and the Bilateral Agreement on Consular Access between India and Pakistan.

The type of research used in this present study is judicial normative legal research that using statute approach and case study. The sources used are secondary data, both consisting of primary legal materials namely conventions and bilateral agreement, secondary legal materials namely journals and books, and tertiary legal materials such as encyclopedias, which processed and analyzed qualitatively.

The results of the study show that first, legal protection for nationals through consular access based on VCCR exists in three forms, namely the right to freedom of communication, consular notification regarding the arrest, detention, or imprisonment of citizens to their state origin without delay, and the right to visit and provide legal assistance to nationals. However, the convention does not interpret the phrase without delay. Second, the dispute settlement in Jadhav case was decided by the ICJ that Pakistan had violated the VCCR for not providing consular notification of the arrest and detention of Jadhav without delay, and for not granting the consular access to Jadhav and Pakistan. However, in the Judgement, the Court count heavily based on the Convention, rather than the bilateral agreement. The Court decided that there were no exceptions to granting consular access to nationals in need, including nationals who were arrested, detained, or tried for alleged crimes of espionage. The Court also granted remedies

to India by annulling the decision of Jadhav's death sentence and ordering Pakistan to try Jadhav for the alleged crime of espionage based on their domestic law and have to grant access consular to Jadhav and Pakistan during the trial. From the results of this study, arise the urgency of interpretation phrase without delay of consular notification and grant the consular access, and/or establish the bilateral agreement, hence states shall easily interpret the phrase without delay of consular notification and granting the consular access.

Keywords: Consular Access, Legal Protection of Nationals, Jadhav Case